



# Rencana Kerja

BADAN KESATUAN  
BANGSA & POLITIK



2021

**KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dapat kami susun. Rencana Kerja ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Lombok Tengah yang berwawasan kebangsaan yang aman dan nyaman dari ancaman rasa berbangsa dan bernegara yang semakin terpuruk akibat krisis kepercayaan dan krisis moral .

Rencana Kerja ini merupakan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan sekaligus sebagai bahan evaluasi, perbandingan dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya sesuai dengan tujuan dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib sejahtera demi kelancaran dan kesinambungan pembangunan yang telah dan sedang giat-giatnya dilaksanakan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Rencana Kerja ini sebagai Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dalam rangka mengevaluasi dan merencanakan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah yang akan datang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Praya, Oktober 2021  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Lombok Tengah,



**MURDI, AP., M.Si, CIQaR**  
**NIP. 197512311994121002**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	45
BAB V PENUTUP .....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rancangan rencana kerja tersebut mengacu pada perencanaan dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga Renja harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku dan berpedoman pada Visi dan Misi yang hendak dicapai baik oleh Pemerintah Daerah maupun SKPD yang bersangkutan.

Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah memuat kebijakan publik dan arah kebijakan dalam mencapai target melalui rencana, program, dan penganggaran tahunan yang telah ditentukan. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1

Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Renja sendiri memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra PD serta merupakan bahan pertimbangan untuk tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Rencana Kerja yang disusun juga tidak mengesampingkan keterkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah tingkat provinsi dan tingkat pusat. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja mampu memuat kebijakan publik dan arah pembangunan selama setahun serta dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen dan mampu menjadi panduan dasar dalam meningkatkan laju pengembangan pembangunan yang harus dilaksanakan secara konsisten, berimbang, tepat sasaran dan berkualitas.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.
11. Peraturan Daerah OPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2).
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.
14. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
2. Sebagai acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.



Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok

dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagaimana format terlampir.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan di tambah tabel T-C.31, sebagaimana halaman lampiran.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
  - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
    1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
    2. Pencapaian SDGs,

3. Pengentasan kemiskinan,
  4. Pencapaian NSPK dan SPM,
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  6. Pengembangan daerah terisolir,
  7. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran.

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada tahun 2020, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 1 tahun dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun 2020 dan APBD Kabupaten Lombok Tengah. Evaluasi ini ditujukan sebagai bahan penyusunan terhadap Renja yang akan datang.

Pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Badan Kesbangpol, telah ditetapkan perencanaan kerja Badan Kesbangpol yang mencakup 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.692.257.000.- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Dalam pelaksanaannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh pagu indikatif sebesar Rp. 2.769.257.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh rupiah ) dan di APBD Perubahan 2020 pagu anggaran Badan Kesbangpol menjadi sebesar Rp. 3,795,155,523.23,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah). Penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 3,531,198,771.00,- atau 93, 04% . Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 dalam hal penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan termasuk baik.

Secara umum program dan kegiatan tersebut telah berhasil diselenggarakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Keberhasilan ini dapat dilihat berdasarkan pencapaian indikator kinerja setiap kegiatan maupun pencapaian indikator kinerja utama serta berdasarkan persentase penyerapan anggaran.

Dari aspek pencapaian indikator kinerja, beberapa kegiatan pada tahun 2020 telah berhasil mencapai target indikator kinerja output yang ditetapkan, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Badan Kesbangpol secara umum telah menyelenggarakan dengan baik dan sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam RENJA tahun 2020. Selain itu, rancangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

Berikut akan disajikan rekapitulasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja**  
**Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat**  
**Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Lombok Tengah**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah**

Kode Prog/Keg	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
01	<b>Program pelayanan adm perkantoran</b>	<b>Persentase layanan adminstrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>96,96</b>	<b>96,96</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, air, telepon, Surat Kabar dan Internet	12	12	12 bln	12 bln	100	12	2	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer, Laptop, Scanner, Printer dan Lemari Arsip)	12	12	11 unit	11 unit	100	12	1	100
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK roda 4 dan roda 2,	19	19	12630 liter	12630 liter	100	19	1	100
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan bulanan keu. SKPD dan Laporan tahunan keua.SKPD	12	12	13 bln	13 bln	100	12	1	100
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor	12	12	12 bln	12 bln	100	12	1	100
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor, materai, dan benda pos lainnya	12	12	12 bln	12 bln	100	12	3	100
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat	12	12	12 dok	12 dok	100	12	14	100
18	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil konsultasi dan koordinasi	12	12	10 dok	10 dok	100	12	1	100

	02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase sarana prasarana kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kendaraan dinas kondisi baik.	3	3	1	1	100	3	3	100
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Gedung / Kantor	19	19	12	12	100	19	19	100
	06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan bulanan, laporan kinerja triwulan, LKPJ, LAKIP, RENJA	5	5	12	12	100	5	5	100
	18	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Angka kejadian konflik antar etnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bhakti Pembauran)	Jumlah Peserta Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bhakti Pembauran)	150	150	150	150	100	750	750	100
		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Angka partisipasi pemilih pada pilpres, pileg dan pilkada</b>	<b>70</b>	<b>76,87</b>	<b>0</b>	<b>72,37</b>	<b>103</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
		Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik	Peserta pembinaan dari ormas dan parpol	100	100	100	100	100	100	100	100
		Penyuluhan Politik kepada Masyarakat	Peserta penyuluhan	120	120	600	600	100	140	140	100
		Pendataan dan Monitoring Kegiatan Ormas/LSM dan Yaysan	Laporan hasil pendataan dan monitoring kegiatan ormas	130	130	12 dok	12 dok	100	150	150	100
		Sosialisasi kepada pengurus partai politik	Peserta sosialisasi	45	45	36	36	100	45	45	100



	Program Penanganan Konflik Sosial	Presentase penyelesaian Konflik Sosial (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pembinaan Kewaspadaan Dini	Dokumen kesepakatan koordinasi Pimpinan Daerah	12 dok	12 dok	12	12	100	12	12	100
	Kegiatan 'Pemantauan orang Asing	Dokumen/Laporan Pemantauan orang asing	12 dok	12 dok	12	12	100	12	12	100
	Kegiatan Pelatihan Ketahanan Bangsa	peserta pelatihan	150	150	139	139	100	200	200	100
	Pemantauan Aliran Kepercayaan	Laporan hasil pemantauan	12 dok	12 dok	12	12	100	12	12	100
	Rencana aksi penanganan konflik sosial	Laporan penanganan konflik	12 dok	12 dok	12	12	100	12	12	100

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1a. Tahun 2012 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a), selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, maka sebagaimana tercantum pada BAB III Pasal 4, mempunyai tugas :

*“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”*

Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan daerah dan menyelenggarakan Sebagian urusan Pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Mengarahkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Merumuskan rencana dan program kerja badan sebagai pedoman kerja sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Merumuskan target pencapaian standar pelayanan public kesatuan bangsa dan politik;
5. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Mengarahkan Sekretaris dan para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Memberi laporan informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
8. Mengevaluasi dan melaporkan tugas kedinasan dan kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks sikap	-	-	3,4 point	3,5 point	3,6 point	3,7 point			3,6 point	3,7 point	
2	Indeks kerjasama dan hub sosial	-	-	3,4 point	3,5 point	3,6 point	3,7 point			3,6 point	3,7 point	
3	Persentase Desa yang mencanangkan Desa Bebas Narkoba	-	-	30,77%	38,46%	46,15%	53,85%			46,15%	53,85%	
4	Meningkatnya Pemahaman Potensi Terjadinya Konflik Masyarakat berlatar agama (%)	-	-	0%	100%	100%	100%			100%	100%	-
5	Persentase Penurunan Konflik Sosial			100%	100%	100%	100%			100%	100%	
6	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan			100%	100%	100%	100%			100%	100%	
7	Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan			100%	100%	100%	100%			100%	100%	
8	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik			100%	100%	100%	100%			100%	100%	
9	Persentase keterlibatan masyarakat lintas agama dan ras			100%	100%	100%	100%			100%	100%	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	angka partisipasi pemilih dalam PEMILU (persen)			0%	0%	0%	76%			0%	76%	
11	Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi (persen)			100%	100%	100%	100%			100%	100%	
12	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik (persen)			25%	40%	50%	55%			50%	55%	
13	Meningkatnya Wawasan /Pemahaman Organisasi Politik (persen)			100%	100%	100%	100%			100%	100%	
14	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi (persen)			87%	89%	90%	91%			90%	91%	
15	Persentase Ormas Yang Bermitra dengan Pemerintah & Dunia Usaha (persen)			-	50%	55%	60%			55%	60%	
16	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Masyarakat (persen)			100%	100%	100%	100%			100%	100%	
17	Presentase penyelesaian Konflik Sosial (persen)			100%	100%	100%	100%			100%	100%	
18	Meningkatnya Kapasitas Deteksi dan Pencegahan Potensi Konflik (persen)			100%	100%	100%	100%			100%	100%	

### 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tingkat kondusifitas wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pencapaian kinerja, pengukuran tingkat keberhasilan dapat diukur melalui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan. Pada Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah terdapat 6 (enam) program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; dan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya OPD baik Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kerja;
- 2) Belum terbentuknya Sistem pengendalian pengawasan ormas asing dan orang asing;
- 3) Belum terbentuknya Sistem pengendalian pengawasan ormas asing dan orang asing;
- 4) Peredaran narkoba yang semakin sistemik di masyarakat;
- 5) Ekosistem informasi yang tidak sehat;
- 6) Perkembangan kehidupan demokrasi yang tidak terpolakan;
- 7) Berkembangnya paham-paham bermasalah di masyarakat;
- 8) Belum tersedianya sarana prasarana dan sumber daya pendukung untuk pemberantasan peredaran gelap precursor narkotika;
- 9) Keberadaan Orang Asing yang tidak taat asas;

10) Belum sinerginya rencana aksi penanganan konflik social di daerah.

Selain itu dapat diidentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Lajunya perkembangan system informasi;
2. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat;
3. Terbunya penanaman modal/investasi asing yang mengarah ke arah eksploitasi Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
4. Terbatasnya akses masyarakat untuk mendapat pekerjaan;
5. Meningkatnya jumlah kunjungan Warga Negara Asing (WNA);
6. Terlalu tergantungnya pada penanam modal/investor sehingga perlu dibangun pendekatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat;
7. Terdapat irisan agenda politik nasional dan politik local.

Namun permasalahan, hambatan dan tantangan tersebut tidak menjadi penghambat Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah untuk mencapai kinerja yang sudah ditargetkan, dengan cara melihat peluang-peluang yang ada dalam membantu mencapai keberhasilan target kinerja, antara lain :

- a. Tersedianya Renstra OPD dan *Masterplan Smart City* dalam membangun *Smart Society* Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Perkembangan teknologi informasi di masyarakat;
- c. Meningkatnya kesadaran demokrasi di masyarakat;
- d. Meningkatnya kesadaran berorganisasi di masyarakat;

Menilik dari hasil pengevaluasian dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, maka diharapkan dalam jangka waktu yang singkat dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan kualitas yang sangat menunjang peningkatan kompetensi dan penjaminan terhadap mutu pembangunan dan sebagai wadah aspirasi masyarakat.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal yang tersusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lombok Tengah, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah. Dokumen rencana kinerja mencakup juga informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.



**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>4,711,489,754</b>					<b>10,459,176,967</b>	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Bakesbangpol	Nilai SAKIP OPD	B	2.786.680.989	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Bakesbangpol	Nilai SAKIP OPD	B	4,435,751,080	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	10 dokumen	30,670,770	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9 dokumen	34,458,984	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Dokumen perencanaan PD (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	3 dokumen	9,201,231	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Dokumen perencanaan PD (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2 dokumen	9,878,491	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bakesbangpol	Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3,067,077	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bakesbangpol	Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5,447,807	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bakesbangpol	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,067,077	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bakesbangpol	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4,178,403	
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bakesbangpol	DPA-SKPD	1 dokumen	3,067,077	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bakesbangpol	DPA-SKPD	1 dokumen	2,453,003	
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bakesbangpol	Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,067,077	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bakesbangpol	Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,367,790	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bakesbangpol	Laporan kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, LKPD)	3 dokumen	9,201,231	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bakesbangpol	Laporan kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, LKPD)	3 dokumen	11,133,490	
9	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>Dokumen administrasi keuangan PD</b>	<b>19 dokumen</b>	<b>2,506,750,929,50</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>Dokumen administrasi keuangan PD</b>	<b>19 dokumen</b>	<b>3,030,480,803</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol	Jumlah bulan terpenuhinya Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	2,478,250,929,50	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol	Jumlah bulan terpenuhinya Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	2,998,683,624	
11	Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bakesbangpol	Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bakesbangpol	Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	3,665,343	
12	Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bakesbangpol	Laporan keuangan bulanan	12 dokumen	18.000.000	Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bakesbangpol	Laporan keuangan bulanan	12 dokumen	20,871,836	
			Laporan keuangan triwulanan	4 dokumen	6.000.000			Laporan keuangan triwulanan	4 dokumen	3,630,000	
			Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	3.000.000			Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	3,630,000	
13	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>Laporan administrasi umum PD</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>112,102,290</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>Laporan administrasi umum PD</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>547,292,353</b>	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bakesbangpol	Komputer dan perlengkapannya	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bakesbangpol	Komputer dan perlengkapannya	2 unit	37,500,000	
			Printer	1 unit	4,000,000			Printer	3 unit	10,500,000	
			Laptop	1 unit	10,000,000			Laptop	4 unit	70,000,000	
			Alat kebersihan	-	-			Alat kebersihan	22 unit	4,395,440	
			Peralatan dan perlengkapan lainnya	20 unit	2,150,290			Peralatan dan perlengkapan lainnya	6 unit	54,046,913	
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tanggaa	Bakesbangpol	Peralatan RT	-	-		Bakesbangpol	Peralatan RT	1 unit	34,400,000	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakesbangpol	Makan minum	12 bulan	21,600,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakesbangpol	Makan minum	12 bulan	24,024,000	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bakesbangpol	Barang cetakan	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bakesbangpol	Barang cetakan	-	-	
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bakesbangpol	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 dokumen	4,440,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bakesbangpol	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 dokumen	4,440,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	17 dokumen	69,912,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	11 dokumen	307,986,000	
20	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>BMD Tercatat</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>96,657,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>BMD Tercatat</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>695,393,111</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bakesbangpol	Kendaraan Dinas	3 unit	96,657,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bakesbangpol	Kendaraan Dinas	2 unit	600,000,000	
	Pengadaan Mebel	Bakesbangpol	Mebel	-	-	Pengadaan Mebel	Bakesbangpol	Mebel	49 unit	95,393,111	
21	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>Layanan pemerintahan daerah</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>14,400,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>Layanan pemerintahan daerah</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>41,981,829</b>	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bakesbangpol	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	-	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bakesbangpol	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	12 unit	8,520,000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpol	Layanan umum kantor	12 bulan	14,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpol	Layanan umum kantor	12 bulan	33,461,829	
24	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>BMD Kondisi Baik</b>	<b>19 unit</b>	<b>26,100,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bakesbangpol	<b>BMD Kondisi Baik</b>	<b>19 unit</b>	<b>86,144,000</b>	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Bakesbangpol	Kendaraan dinas terpelihara	19 unit	22,385,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Bakesbangpol	Kendaraan dinas terpelihara	14 unit	80,744,000	
			STNK kendaraan dinas yang diperbaharui	19 unit	9,196,000			STNK kendaraan dinas yang diperbaharui	14 unit	5,400,000	
26	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Bakesbangpol	<b>Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik</b>	<b>100%</b>	<b>105,419,735</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Bakesbangpol	<b>Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik</b>	<b>100%</b>	<b>810,427,396</b>	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Persentase keterlibatan masyarakat lintas agama dan ras	100%	105,419,735	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Meningkatnya Harmoni Sosial	100%	810,427,396	
28	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 dokumen	4,984,235	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 dokumen	11,385,390	
29	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Data dan Informasi Wilayah Rawan Konflik	1 dokumen	4,984,235	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Data dan Informasi Wilayah Rawan Konflik	1 dokumen	12,015,390	
30	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Kemah Bakti, Seminar Diskusi 4 Pilar & Sosialisasi GNRM)	2 dokumen	38,266,550	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Dialog Kebangsaan, Bimtek GNRM, Pelatihan Bela Negara, & Kemah Pembaruan)	5 dokumen	660,637,776	Terdapat penambahan 2 aktivitas

No.	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Dokumen laporan hasil koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 dokumen	43,190,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Dokumen laporan hasil koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 dokumen	63,194,420	
32	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Dokumen laporan monev proses Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 dokumen	13,994,715	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Dokumen laporan monev proses Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5 dokumen	63,194,420	
33	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	0	978,254,900	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	0	-	
			Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	100%	978,254,900			Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	100%	649,188,743	
			Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	25%	978,254,900			Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	50%	649,188,743	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol	Meningkatnya Wawasan (Pemahaman) Organisasi Politik	100%	978,254,900	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol	Meningkatnya Wawasan (Pemahaman) Organisasi Politik	100%	1,298,377,486	
35	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokumen	3.887.052	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 dokumen	9,840,000	

No.	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Data dan Informasi PARPOL	1 dokumen	3.887.052	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Data dan Informasi PARPOL	1 dokumen	5,243,124	
37	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Sosialisasi kepada Pengurus PARPOL Penerima dana hibah, Sosialisasi PEMILU & Pemberian Dana Hibah PARPOL)	2 dokumen	947,198,296	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Bimtek kepada Pengurus PARPOL Penerima dana hibah, Bimtek kepada Pengurus PARPOL yang tidak menerima dana hibah, Pembentukan Desk Pemilu & Pemberian Dana Hibah PARPOL)	4 dokumen	1,228,161,362	Terdapat penambahan 1 aktivitas
38	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Laporan hasil Koordinasi	1 dokumen	4,237,500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Laporan hasil Koordinasi	1 dokumen	36,953,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Profile PARPOL di Lombok Tengah	1 dokumen	19,045,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Profile PARPOL di Lombok Tengah	1 dokumen	18,180,000	
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	87%	110,249,490	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	90%	419,208,274	
			Persentase Ormas Yang Bermitra dengan Pemerintah & Dunia Usaha	-	110,249,490			Persentase Ormas Yang Bermitra dengan Pemerintah & Dunia Usaha	55%	419,208,274	
41	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Masyarakat	-	110,249,490	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Masyarakat	100%	838,416,548	
42	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen	8,639,245	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen	5,243,124	



No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Kajian Pembinaan Ormas dan Dokumen Rancangan Kebijakan Pembinaan Ormas	-	8,639,245	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Kajian Pembinaan Ormas dan Dokumen Peraturan Daerah Pembinaan Ormas	2 dokumen	200,000,000	
44	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Dialog Publik Ormas & Orpo dan Pemberian Dana Hibah Ormas)	2 dokumen	57,905,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Dialog Publik Ormas & Orpo dan Pemberian Dana Hibah Ormas)	2 dokumen	594,148,424	Sasaran hibah 10 Ormas
45	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Laporan hasil Koordinasi	1 dokumen	14,320,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Laporan hasil Koordinasi	1 dokumen	7,965,000	
46	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Profile ORMAS	1 dokumen	20,746,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Profile ORMAS	1 dokumen	31,060,000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol	Persentase Desa yang mencanangkan Desa Bebas Narkoba	30,77%	60,479,755	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol	Persentase Desa yang mencanangkan Desa Bebas Narkoba	30,77%	411,474,229	
			Meningkatnya Pemahaman Potensi Terjadinya Konflik Masyarakat berlatar agama	-	60,479,755			Meningkatnya Pemahaman Potensi Terjadinya Konflik Masyarakat berlatar agama	-	411,474,229	
48	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Desa Bersih Narkoba (BERSINAR)	2 desa	60,479,755	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Desa Bersih Narkoba (BERSINAR)	10 desa	822,948,457	
49	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 dokumen	3,942,520	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 dokumen	28,440,109	
50	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Data dan informasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	3 dokumen	3,942,520	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Data dan informasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	1 dokumen	46,013,851	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Fasilitas Desa Bersinar)	2 dokumen	15,200,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Fasilitas Desa Bersinar, fasilitas pengembangan ekonomi kreatif bagi pemuda lintas agama & etnis, sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi bahaya paham radikalisme dan terorisme, fasilitas penanganan konflik berlatar belakang agama melalui Tim Pakem, FKUB & MUI, Fasilitas penyiapan kelembagaan BNN Kabupaten)	6 dokumen	505,084,074	sasaran fasilitas desa bersinar 10 desa (7 desa status siaga, 2 desa status waspada dan 1 desa bahaya), dan penambahan 5 aktivitas
52	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Laporan hasil Koordinasi TIMDU PKS, PAKEM, FKUB	2 dokumen	23,400,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Laporan hasil Koordinasi TIMDU PKS, PAKEM, FKUB	1 dokumen	209,672,073	
53	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Profile Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	1 dokumen	13,994,715	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Profile Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	1 dokumen	33,738,350	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol	Presentase penyelesaian Konflik Sosial	100%	767,061,886	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol	Presentase penyelesaian Konflik Sosial	100%	2,253,256,000	
55	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Meningkatnya Kapasitas Deteksi dan Pencegahan Potensi Konflik	100%	767,061,886	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Meningkatnya Kapasitas Deteksi dan Pencegahan Potensi Konflik	100%	2,253,256,000	
56	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 dokumen	4,788,425	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 dokumen	8,944,847	
57	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Data dan Informasi Potensi & Penanganan Konflik Sosial	1 dokumen	4,788,425	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Data dan Informasi Potensi & Penanganan Konflik Sosial	2 dokumen	7,496,008	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Bale Mediasi)	2 dokumen	107,500,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Bale Mediasi, SATPULKET dan Sistem Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing & Lembaga Asing)	3 dokumen	1,175,685,445	
59	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Laporan hasil Koordinasi TKDPD & TIM PORA	2 dokumen	16,250,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Dokumen Laporan hasil Koordinasi TKDPD, TIM PORA & Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS)	3 dokumen	96,852,954	
60	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Peta Potensi Konflik Sosial di Daerah	1 dokumen	29,685,036	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Peta Potensi Konflik Sosial di Daerah	1 dokumen	40,973,792	
61	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Bakesbangpol	Persentase Kebijakan FORKOPIMDA yg ditindaklanjuti	100%	604,050,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Bakesbangpol	Persentase Kebijakan FORKOPIMDA yg ditindaklanjuti	100%	923,302,954	

**2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Selaku Badan yang memiliki Tanggung Jawab dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya melalui program dan kegiatan yang direncanakan adalah:

No	Program
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>
3	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>
4	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>
5	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>
6	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan. Adapun beberapa usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan terkait dengan isu-isu penting yang sudah dijabarkan sebelumnya untuk Tahun 2021 di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada table 2.4 berikut :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
				Satuan	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Bakesbangpol			500,000,000	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Bakesbangpol			500,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Pemberian Dana Hibah Ormas & Orpol	10 Ormas/Orpol	500,000,000	
2	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Bakesbangpol			300,000,000	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Bakesbangpol			300,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Peningkatan Sarana Prasarana FKUB & MUI	2 Lembaga Keagamaan tingkat kabupaten	300,000,000	
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Bakesbangpol			200,000,000	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Bakesbangpol			200,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Peningkatan Sarana Prasarana BALE MEDIASI	Lembaga Mediasi Tingkat Kabupaten	200,000,000	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, adapun kegiatan secara nasional dilaksanakan melalui melalui 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
4. Fasilitasi Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, Agama, dan Masyarakat;
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

Sehingga diharapkan pada akhirnya program/kegiatan yang berjalan mampu bereperan secara totalitas terhadap index pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah dan tepat sasaran.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah



ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun tahun 2021–2026 menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu **“TERWUJUDNYA NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT”** dan **“TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026 menetapkan sasaran **“Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya”** dan **“Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah beserta indikator kerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

## Kabupaten Lombok Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022
1.	TERWUJUDNYA NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik berlatar belakang SARA yang tertangani	100 %	100 %
2	TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	100 %	100 %
			Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	100 %	100 %

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021 merupakan rencana pelaksanaan tahun pertama penyelenggaraan pemerintahan, yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan pertimbangan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021.

Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Badan Kesbangpol yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA.

Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Berikut disajikan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bakesbangpol Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Lombok Tengah pada Tabel 4.1:

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bakesbangpol Tahun 2021**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4,711,489,754				7,466,088,711
						Indeks Toleransi		Poin				Poin	70,000,000
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		B	2.786.680.989			B	2,426,327,338
8	01	01	2.'01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD		10	30,670,770			10	29,681,609
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan PD (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	Bakesbangpol	3	9,201,231	APBD KAB.	rutin	3	10,902,334
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Bakesbangpol	1	3,067,077	APBD KAB.	rutin	1	4,066,405
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bakesbangpol	1	3,067,077	APBD KAB.	rutin	1	3,476,790
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	Bakesbangpol	1	3,067,077	APBD KAB.	rutin	1	2,777,404
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	Bakesbangpol	1	3,067,077	APBD KAB.	rutin	1	2,702,561
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, LKPD)	Bakesbangpol	3	9,201,231	APBD KAB.	rutin	3	5,756,115
8	01	01	2.'02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD		19	2,506,750,929.00			19	2,272,047,221.10

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol	14	2,478,250,929.00	APBD KAB.	rutin	14	2,243,670,846.10
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Bakesbangpol	1	1,500,000	APBD KAB.	rutin	1	3,225,343
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan	Bakesbangpol	12	27,000,000	APBD KAB.	rutin	12	15,429,492
						Laporan keuangan triwulanan	Bakesbangpol	4		APBD KAB.	rutin	4	5,434,050
						Laporan keuangan semesteran	Bakesbangpol	2		APBD KAB.	rutin	2	4,287,490
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan administrasi umum PD</b>		<b>1</b>	<b>112,102,290</b>			<b>1</b>	<b>26,722,508</b>
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer dan perlengkapannya	Bakesbangpol	-	-	APBD KAB.	rutin	1	-
						Printer	Bakesbangpol	1	4,000,000	APBD KAB.	rutin	1	3,500,000
						Laptop	Bakesbangpol	1	10,000,000	APBD KAB.	rutin	1	-
						Alat kebersihan	Bakesbangpol	-	-	APBD KAB.	rutin	18	-
						Peralatan dan perlengkapan lainnya	Bakesbangpol	20	2,150,290	APBD KAB.	rutin	2	-
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan RT	Bakesbangpol	1	-	APBD KAB.	rutin	1	-
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	Bakesbangpol	12	21,600,000	APBD KAB.	rutin	12	16,200,000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	Bakesbangpol	-	-	APBD KAB.	rutin	1	2,582,508
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bakesbangpol	3	4,440,000	APBD KAB.	rutin	3	-

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	Bakesbangpol	17	69,912,000	APBD KAB.	rutin	18	4,440,000
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BMD Tercatat</b>		<b>3</b>	96,657,000	APBD KAB.	rutin	<b>3</b>	-
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas	Bakesbangpol	3	96,657,000	APBD KAB.	rutin	1	-
					Pengadaan Mebel	Mebel	Bakesbangpol	-	-	APBD KAB.	rutin	2	-
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Layanan pemerintahan daerah</b>		<b>12</b>	<b>14,400,000</b>			<b>12</b>	-
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	Bakesbangpol	-	-	APBD KAB.	rutin	10	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan umum kantor	Bakesbangpol	12	14,400,000	APBD KAB.	rutin	12	-
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BMD Kondisi Baik</b>		<b>19</b>	<b>26,100,000</b>			<b>19</b>	<b>97,876,000</b>
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas terpelihara (BBM)	Bakesbangpol	19	26,100,000	APBD KAB.	rutin	19	89,526,000
						STNK kendaraan dinas yang diperbaharui	Bakesbangpol	19		APBD KAB.	rutin	19	8,350,000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik</b>		<b>100</b>	<b>105,419,735</b>			<b>100</b>	<b>192,440,040</b>
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase keterlibatan masyarakat lintas agama dan ras		<b>100</b>	<b>105,419,735</b>			<b>100</b>	<b>192,440,040</b>

				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Kemah Bakti, Seminar Diskusi 4 Pilar, Sosialisasi GNRM & Fasilitator FKUB & MUI)	lombok tengah	3	4,984,235	APBD KAB.	rutin	4	101,015,020
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Data dan Informasi Wilayah Rawan Konflik	lombok tengah	1	4,984,235	APBD KAB.	rutin	4	4,984,235
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Kemah Bhakti, Seminar Diskusi 4 Pilar & Sosialisasi GNRM)	lombok tengah	2	38,266,550	APBD KAB.	rutin	3	4,984,235
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen laporan hasil koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	lombok tengah	1	43,190,000	APBD KAB.	rutin	1	38,266,550
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen laporan monev proses Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	lombok tengah	1	13,994,715	APBD KAB.	rutin	4	43,190,000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>angka partisipasi pemilih dalam PEMILU</b>		<b>0</b>	<b>978,254,900</b>			<b>0</b>	<b>2,288,628,206</b>
					<b>Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi</b>		<b>100</b>	<b>978,254,900</b>			<b>100</b>	<b>2,288,628,206</b>
					<b>Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik</b>	lombok tengah	<b>25</b>	978,254,900	APBD KAB.	rutin	<b>40</b>	2,288,628,206

					<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Meningkatnya Wawasan/Pemahaman Organisasi Politik</b>		<b>100</b>				<b>7</b>	
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	lombok tengah	2	3,887,052	APBD KAB.	rutin	2	1,153,836,603
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Data dan Informasi PARPOL	lombok tengah	1	3,887,052	APBD KAB.	rutin	2	3,887,052
					Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Sosialisasi kepada Pengurus PARPOL Penerima dana hibah, Sosialisasi PEMILU & Pemberian Dana Hibah PARPOL)	lombok tengah	2	947,198,296	APBD KAB.	rutin	2	3,887,052
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Laporan hasil Koordinasi)	lombok tengah	1	4,237,500	APBD KAB.	rutin	1	1,122,780,000



					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Profile PARPOL di Lombok Tengah	lombok tengah	1	19,045,000	APBD KAB.	rutin	2	4,237,500
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Ormas yang Aktif dalam Manajemen Administrasi</b>		<b>87</b>	<b>110,249,490</b>			<b>89</b>	<b>185,432,978</b>
						<b>Persentase Ormas yang Bermitra dengan Pemerintah dan Dunia Usaha</b>		<b>0</b>					
					<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan Organisasi Masyarakat</b>		-	<b>110,249,490</b>			<b>17</b>	<b>185,432,978</b>
					Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	lombok tengah	2	8,639,245	APBD KAB.	rutin	5	110,249,489
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Kajian Pembinaan Ormas dan Dokumen Rancangan Kebijakan Pembinaan Ormas	lombok tengah	-	8,639,245	APBD KAB.	rutin	5	-
					Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Dialog Publik Ormas & Orpol dan Pemberian Dana Hibah Ormas	lombok tengah	2	57,905,000	APBD KAB.	rutin	3	8,639,245
					Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Dokumen Laporan hasil Koordinasi	lombok tengah	1	14,320,000	APBD KAB.	rutin	2	8,639,245

					Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Profile ORMAS	lombok tengah	1	20,746,000	APBD KAB.	rutin	5	57,905,000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Desa yang mencanangkan Desa Bebas Narkoba</b>		<b>38.46</b>	<b>60,479,755</b>			<b>38.46</b>	<b>156,025,508</b>
					<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		<b>9</b>	<b>60,479,755</b>			<b>9</b>	<b>156,025,508</b>
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Sosialisasi Anti Narkoba, Sosialisasi Pencegahan Paham Radikalisme, Pemantauan Aliran Kepercayaan)	lombok tengah	3	3,942,520	APBD KAB.	rutin	3	-
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Data dan informasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	lombok tengah	3	3,942,520	APBD KAB.	rutin	3	14,320,000
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Fasilitasi Desa Bersinar)	lombok tengah	2	15,200,000	APBD KAB.	rutin	2	20,746,000

					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan hasil Koordinasi TIMDU PKS, PAKEM, FKUB	lombok tengah	2	23,400,000	APBD KAB.	rutin	2	60,479,754
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Profile Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	lombok tengah	1	13,994,715	APBD KAB.	rutin	1	60,479,754
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Presentase penyelesaian Konflik Sosial</b>		<b>100</b>	<b>767,061,886</b>			<b>100</b>	<b>2,217,234,641</b>
8	01	06	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Deteksi dan Dan Pencegahan Potensi Konflik</b>		<b>100</b>	<b>767,061,886</b>			<b>100</b>	<b>2,217,234,641</b>
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Bale Mediasi, Pertemuan FORKOPIMDA, TKDPD, TIMDU PKS, TIM POA, dan kegiatan Pemantauan Orang Asing)	lombok tengah	1	4,788,425	APBD KAB.	rutin	6	3,942,520

				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Data dan Informasi Potensi & Penanganan Konflik Sosial	lombok tengah	1	4,788,425	APBD KAB.	rutin	6	30,200,000
					Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Bale Mediasi)	lombok tengah	1	107,500,000	APBD KAB.	rutin	4	8,400,000
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Laporan hasil Koordinasi TKDPD & TIM PORA	lombok tengah	2	16,250,000	APBD KAB.	rutin	1	13,994,715
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peta Potensi Konflik Sosial di Daerah	lombok tengah	1	29,685,036	APBD KAB.	rutin	1	1,080,348,703
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)	Persentase Kebijakan FORKOPIMDA yg ditindaklanjuti	lombok tengah	1	604,050,000	APBD KAB.	rutin	6	1,080,348,703
<b>JUMLAH DANA</b>								<b>4,711,489,754</b>				<b>7,536,088,710.60</b>

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen rencana tahunan yang didalamnya termuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Di dalam RENJA ini juga disampaikan indikator kinerja setiap program dan kegiatan beserta target capaiannya pada tahun 2019 & 2020 sebagai salah satu tolok ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

Penetapan program dan kegiatan pada RENJA ini telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2), Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

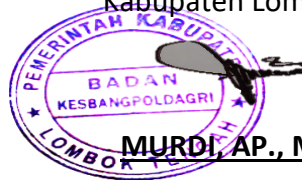
Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, masing-masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hendaknya berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini. Selain itu, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan. Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik.

Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan pendekatan secara formal maupun nonformal dengan para stakeholders. Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan manfaat Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

Praya, September 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lombok Tengah,



**MURDI, AP., M.Si, CIQaR**

NIP. 197512311994121002